

BAB I

PENDAHULUAN

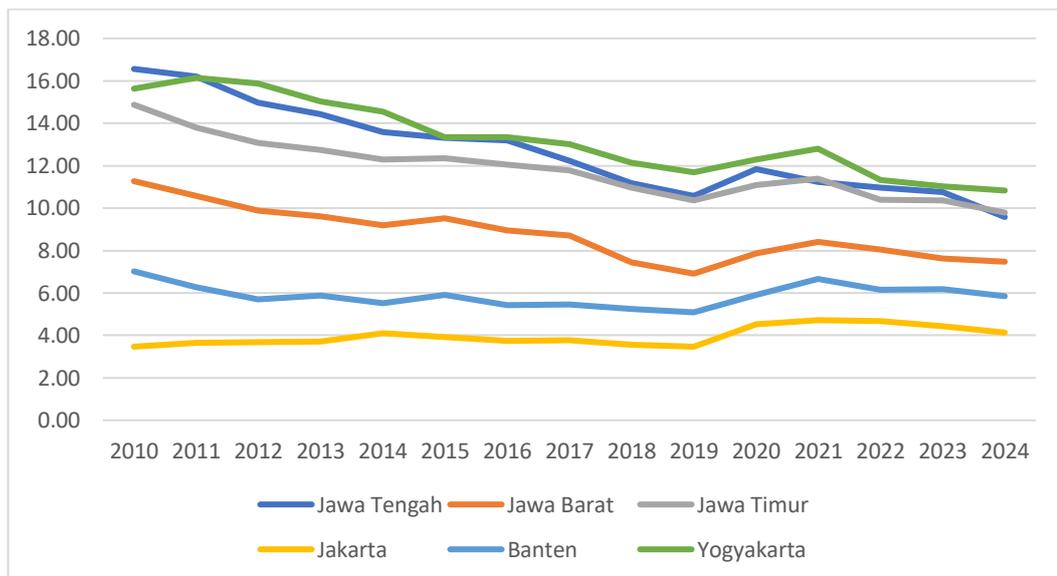
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang kompleks serta multidimensi di Indonesia (Kolibu *et al.*, 2019). Fenomena ini mencerminkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Soekanto, 2013). Dampaknya sangat luas, mencakup penurunan kualitas hidup, keterbatasan peluang pengembangan diri, serta penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia (Johan, 2020).

Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia, memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 50% lebih (Simanjuntak & Widodo, 2025). Namun, kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Ketimpangan pembangunan antardaerah di Pulau Jawa masih tinggi, di mana wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya berkembang pesat, sementara daerah pedesaan masih tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan terjadinya urbanisasi yang masif, di mana masyarakat desa berpindah ke kota dengan harapan mendapatkan penghidupan

yang lebih baik. Namun, banyak yang akhirnya terjebak dalam kemiskinan kota karena keterbatasan keterampilan dan rendahnya daya saing.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada September 2024 tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,57% (bps.go.id, 2025). Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang ditampilkan pada grafik berikut:

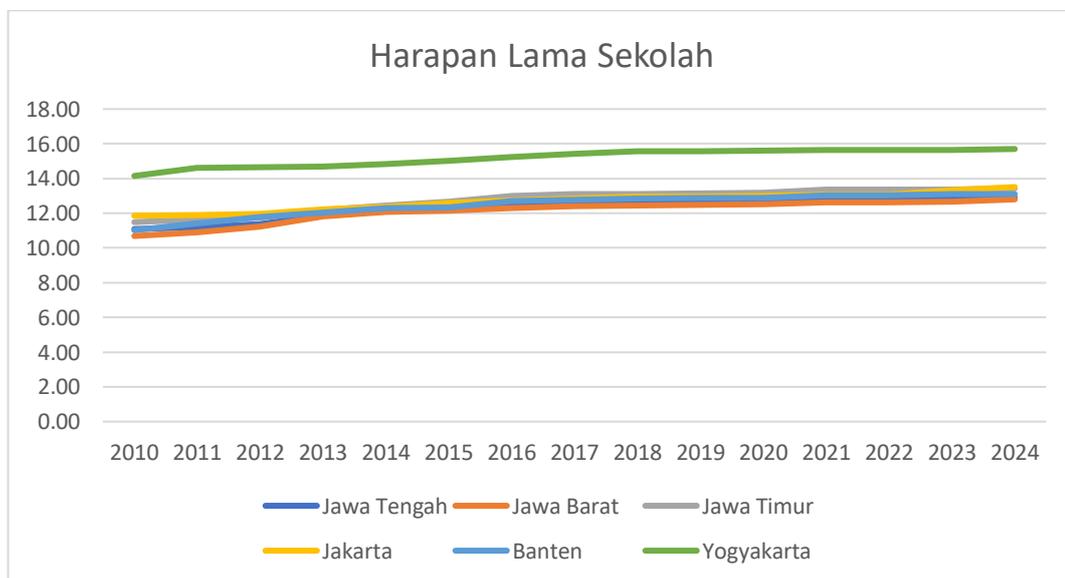


Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan 6 Provinsi di Jawa 2010-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Lima belas tahun terakhir menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi dalam tabel. Jawa Tengah menurun dari 11,84% pada 2020 menjadi 9,58% pada 2024, diikuti Jawa Timur dari 11,09% menjadi 9,79%, dan DIY Yogyakarta dari 12,28% menjadi 10,83%. Tingkat kemiskinan di Jakarta relatif stabil dan berada di angka rendah, hanya sedikit berubah dari 4,53% menjadi 4,14%. Tahun 2024, tiga provinsi dengan tingkat

kemiskinan tertinggi adalah DIY Yogyakarta (10,83%), Jawa Tengah (9,58%), dan Jawa Timur (9,79%), yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Harapan lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak pada usia tertentu jika mengikuti jalur pendidikan yang ideal dan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Siskawati *et al.*, 2021). Semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin besar peluang individu untuk memperoleh pendidikan yang memadai, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah grafik harapan lama sekolah di 6 provinsi Pulau Jawa selama 2010-2024:



Gambar 1. 2 Harapan Lama Sekolah 6 Provinsi di Jawa 2010-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

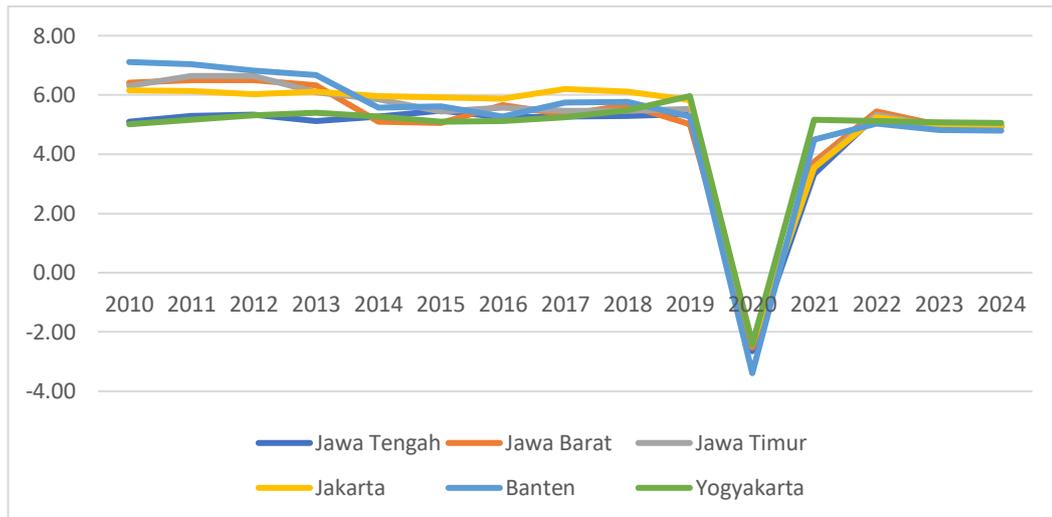
Tingkat harapan lama sekolah di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2010 hingga 2024. Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 11,09 menjadi 12,90 tahun. Jawa Barat naik dari 10,69

menjadi 12,80 tahun, mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan. Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 11,49 menjadi 13,43 tahun. Jakarta tumbuh dari 11,86 menjadi 13,51 tahun, yang menandakan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan. Banten meningkat dari 11,02 menjadi 13,10 tahun. DIY Yogyakarta secara konsisten mencatat angka tertinggi setiap tahun, dari 14,15 tahun di 2010 menjadi 15,70 tahun pada 2024, menjadikannya provinsi dengan harapan lama sekolah tertinggi.

Penelitian terdahulu telah membuktikan adanya hubungan kuat antara harapan lama sekolah dan pengentasan kemiskinan seperti Studi yang dilakukan oleh Widyanto & Hutabarat (2024) menunjukkan bahwa variabel harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian (Aziza *et al.*, 2022) juga menunjukan hasil yang serupa yaitu harapan lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (Adisasmita, 2013). Pertumbuhan ini mencerminkan bagaimana perekonomian berkembang secara dinamis, ditandai dengan meningkatnya output secara agregat yang biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin besar potensi wilayah tersebut dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya pertumbuhan ekonomi atau bahkan kontraksi ekonomi

menunjukkan terhambatnya aktivitas produksi dan distribusi, yang dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di 6 Provinsi di Pulau Jawa:



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi di Jawa 2010-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

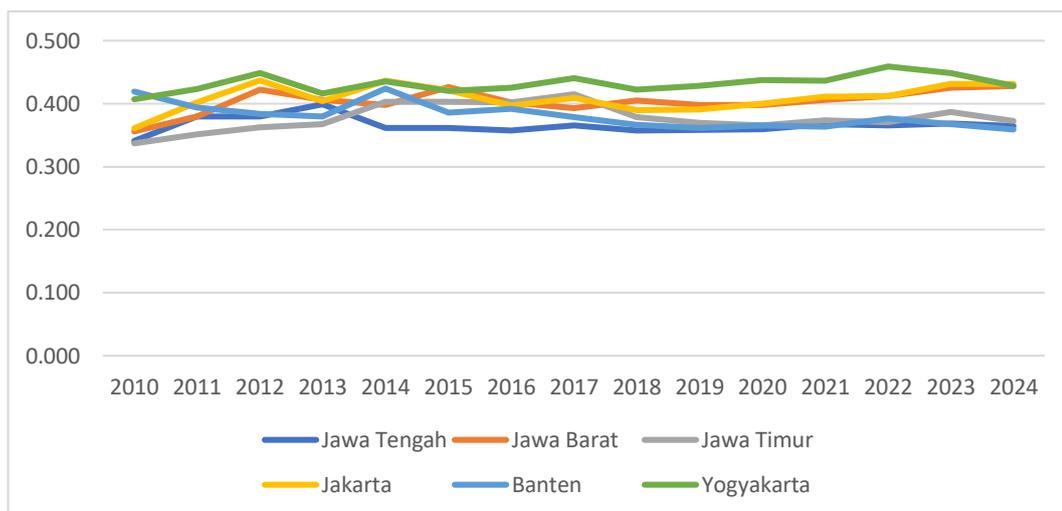
Selama periode 2010 hingga 2024, keenam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Jawa Tengah mengalami pertumbuhan stabil di kisaran 5% sebelum kontraksi -2,65% di 2020, lalu pulih menjadi 4,95% pada 2024. Jawa Barat mencatat angka tertinggi 6,50% pada 2011–2012, turun ke -2,52% saat pandemi, dan kembali tumbuh ke 4,95%. Jawa Timur mencerminkan pola serupa, dengan puncak 6,64% di awal dekade, kontraksi -2,33% pada 2020, dan pemulihan ke 4,93% di 2024. DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, sempat tumbuh di atas 6% sebelum menurun drastis ke -2,39% di 2020 dan kembali naik ke 4,90%. Banten, yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2010 sebesar 7,11%, mengalami kontraksi terdalam

pada 2020 (-3,39%), namun menunjukkan pemulihan ke 4,79% di akhir periode. Sementara itu, Yogyakarta mengalami pertumbuhan lebih moderat namun konsisten, dengan kontraksi -2,42% pada 2020 dan mencatat pertumbuhan 5,05% pada 2024 sebagai yang tertinggi di antara seluruh provinsi Pulau Jawa pada tahun tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Hanifah & Hanifa (2021) menemukan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena peningkatan aktivitas ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Hasibuan (2023) menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak selalu berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Gini Ratio menjadi salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dengan melihat rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata (semua individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu atau kelompok kecil) (Putra *et al.*, 2022). Ketimpangan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kesulitan dalam

mengakses sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Akibatnya, kelompok berpenghasilan rendah tetap terjebak dalam siklus kemiskinan tanpa adanya mobilitas ekonomi yang signifikan. Berikut adalah data *Gini Ratio* pada 6 Provinsi di Jawa tahun 2010-2024:



Gambar 1. 4 *Gini Ratio* 6 Provinsi di Jawa 2010-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2010 hingga 2024, gini ratio di seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi, mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan. Jawa Tengah bergerak di kisaran 0,341 hingga 0,399, dengan tren relatif stabil dalam dekade terakhir. Jawa Barat menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 0,356 menjadi 0,428. Jawa Timur juga mengalami variasi, namun tetap berada di bawah angka 0,4 dalam sebagian besar tahun. Jakarta cenderung menunjukkan gini ratio yang tinggi, mencapai puncak 0,437 pada 2012 dan stabil di kisaran 0,431 pada 2024. Banten mengalami penurunan, dari 0,419 di 2010 menjadi 0,359 pada 2024. Yogyakarta sempat menyentuh angka tinggi 0,459 pada 2022, namun kembali menurun menjadi 0,428. Provinsi dengan tingkat gini ratio paling tinggi

pada tahun 2024 adalah Jakarta dengan angka 0,431 dan Provinsi dengan tingkat gini ratio paling rendah adalah Banten dengan angka 0,359.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi cenderung memperburuk kondisi kemiskinan, seperti studi yang dilakukan oleh Saleh & Rizkina (2021) yang menemukan bahwa peningkatan *Gini Ratio* dapat meningkatkan angka kemiskinan. Penelitian lain oleh Maulana *et al.* (2022) juga mengungkapkan bahwa wilayah dengan *Gini Ratio* yang semakin tinggi juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan judul penelitian ini yakni **“PENGARUH LAMA SEKOLAH, PERTUMUHAN EKONOMI, DAN *GINI RATIO* TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh *gini ratio* terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh *gini ratio* terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pulau Jawa dengan mengambil data pada 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis meliputi Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Gini Ratio*, sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketiga variabel independen terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Pulau Jawa. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentang tahun 2010 hingga 2024 atau selama 15 tahun terakhir, dengan data tahunan sebagai dasar analisis. Sumber data diperoleh dari instansi resmi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) agar data valid dan akurat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperkuat teori-teori pembangunan ekonomi dan teori distribusi pendapatan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan dalam upaya mengatasi kemiskinan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau pijakan awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan kemiskinan dengan pendekatan dan variabel yang serupa maupun berbeda.